

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah dan memeranginya. Awal tahun 1990-an menjadi tonggak munculnya rezim perubahan iklim global yang ditandai dengan terbentuknya UNFCCC pada tahun 1992. Pembentukan kerangka kerja PBB ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaksanaan negosiasi antara negara-negara di dunia untuk menyepakati mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju. Selain itu, pemakaian bahan bakar fosil, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dan penebangan liar hutan merupakan sumber utama dari emisi dunia.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpartisipasi aktif dengan mengajak negara-negara maju yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurangi emisinya dengan merespon isu perubahan iklim melalui kebijakan-kebijakan yang progresif. Indonesia senantiasa mengajak negara-negara maju untuk meningkatkan komitmennya terhadap mekanisme pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Tidak semua negara maju merespon ancaman perubahan iklim dengan tindakan yang sama. Amerika Serikat secara resmi menolak untuk terikat dalam mekanisme tersebut dengan alasan mengganggu kepentingan ekonominya.

Strategi politik luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global jika dilihat dari tipologi strategi politik luar negerinya cenderung pada tipe *concordance* strategy. Hal ini mungkin merupakan pilihan paling rasional mengingat bahwa pemerintah Indonesia pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa kapabilitasnya (terutama ekonomi) memang sangat lemah sehingga rentan terhadap setiap kemungkinan munculnya konflik baik dalam lingkungan domestik, regional ataupun internasional. Karenanya akan berusaha memelihara hubungan yang harmonis dengan negara atau pihak lain yang dianggap memiliki kapabilitas yang lebih kuat dari dirinya. Indonesia tidak

memandang isu lingkungan hidup sebagai ancaman, tetapi karena adanya desakan dan tekanan dari dunia internasional, maka isu ini menjadi penting. Masalah lingkungan bersifat *borderless* dan memerlukan kerjasama dari semua pihak dalam mengatasinya. Adanya tekanan dari dunia internasional khususnya negara-negara maju terhadap Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan persyaratan serta ketentuan yang diajukan agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan negara maju menjadikan Indonesia tidak bisa menghindar dari tekanan yang ada. Ditambah lagi dengan lemahnya kondisi perekonomian Indonesia, menyebabkan Indonesia semakin bergantung dengan bantuan dari negara-negara lain.

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim juga dipengaruhi oleh kondisi domestik. Sistem politik domestik yang memberi ruang kepada semua pihak untuk memperjuangkan gagasannya bagi kemajuan bangsa telah dimanfaatkan dengan maksimal oleh semua pihak yang berkepentingan dengan isu perubahan iklim ini. Peranan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan dan menerapkan peraturan perlindungan lingkungan dengan ketat telah diimplementasikan dengan baik berkat kerja sama dengan semua kalangan. WALHI sebagai lembaga yang berkecimpung dalam masalah lingkungan hidup di dalam negeri, turut serta memberikan usulan-usulan kebijakan dan kritik terhadap pemerintah agar tampil aktif dalam melindungi warganya dari ancaman perubahan iklim.

Jika di antara negara maju terjadi pertentangan kepentingan yang tajam terkait dengan resiko ekonomi yang akan ditanggung. Sebab melakukan pengurangan emisi berarti memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang telah dicapai negara-negara maju. Perundingan internasional konvensi perubahan iklim yang berlangsung setiap tahun kemudian menjadi arena pertarungan kepentingan ekonomi dan politik sesama negara maju maupun negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim global dari kebuntuan-kebuntuan perundingan yang mengancam bubar nya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim global.